



USAI SIDANG: Terdakwa Wayan Candra (tiga dari kanan) usai sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin.

MIFTAHUDDINRADAR BALI

Candra Sering Lakukan Transaksi

Kalau Tak Tarik Uang, Transfer

DENPASAR - Staf mantan Bupati Klungkung Wayan Candra mengaku sering diperintah melakukan transaksi bank. Baik itu menarik maupun transfer uang. Jumlahnya berkisar Rp 5 juta hingga Rp 100 juta. Saking seringnya, sehari bisa dua kali transaksi. Hal itu diungkapkan Ni Wayan Setyawati, staf

Bagian Umum Pemkab Klungkung saat menjadi saksi kasus korupsi dengan terdakwa Candra di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin (19/3).

"Keseharian saya membantu bendahara umum," kata Setyawati di hadapan majelis hakim Hasoloan Sianturi (ketua), Sumali (anggota), dan Hartono (anggota).

Dia mengatakan, memang kerap diper-

intah oleh Candra dalam urusan transaksi. "Seperti menyeter atau menarik dana," sambungannya. Dia mengaku sangat sering diperintah Candra menyeter dan menarik dana. Misalnya transaksi di BCA, BPD, BNI, Mandiri, dan lainnya. "Masih ingat nomor rekeningnya?" tanya hakim. Saksi Setyawati mengaku tidak ingat ■

► Baca **Candra...** Hal 31

Sempat Disuruh Buat 50 Kuitansi

■ CANDRA...

Sambungan dari hal 21

Dia mengaku memang nomor rekening sudah diberikan oleh terdakwa. Namun, saat ini tetap dia mengaku lupa.

Sedangkan besaran uang yang ditransfer mulai Rp 5 juta sampai Rp 100 juta. Bahkan, sering satu hari bisa dua kali ditugaskan oleh Candra untuk melakukan transaksi.

Namun, banyak hal juga tidak bisa dijelaskan gamblang. Hanya dia juga mengakui urusan membuat kuitansi juga pernah. "Sempat saya buat kuitansi sampai 50 lembar," imbuh Setyawati. Termasuk, kata dia, kuitansi pembelian tanah dan membantu orang sakit, seperti bantuan sosial dari bupati.

Pada sidang kemarin, Candra sendiri didampingi oleh pengacaranya Warsa T. Buana,

Suryatin Lijaya, Nyoman Putra, dan Stuti Mandala. Selain Setyawati, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Azman Tanjung, Made Pasek Antara dan kawan - kawan juga menghadirkan saksi lainnya. Mereka adalah Komang Novi, Desak Vivi, Julia Rahmawati, Lanang Saputra, Made Ami Asriani, Made Seger, RR Rujati, Ketut Panca, dan Kadek Sukarjana. Keterangan saksi lainnya hampir sama dengan keterangan Setyawati.

Seperti halnya berita sebelumnya, nilai total korupsi dan gratifikasi atas terdakwa Candra adalah Rp 60 miliar lebih atau Rp 60.026.654.218. "Dalam kurun waktu 2003 sampai 2013 terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan, asal - usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi dan gratifikasi Rp 60.026.654.218," tegas jaksa. (art/yes)

Edisi : Jumat, 20 Maret 2015

Hal : 21



Hibah dan Perdin

Jadi Temuan

Temuan Pra Audit BPK di Pemkab Badung

- Pada APBD tahun 2014, Pemkab Badung membuat pagu anggaran untuk belanja hibah ditetapkan sebesar Rp 102 miliar.
- Dari anggaran tersebut Rp 61,6 miliar difasilitasi oleh legislatif.
- Anggaran ini diarahkan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan yang tidak terakomodir dalam musrenbang maupun di APBD.

- Faktanya, BPK menemukan dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah yang diarahkan oleh anggota dewan. Sebab ada belanja hibah yang diarahkan untuk pembangunan, tapi setelah dicek ke lapangan bangunannya tidak ada.
- Selain dana hibah dewan, BPK juga disebut menemukan banyak pelanggaran anggaran perjalanan dinas oleh SKPD atau instansi kedinasan.



GRAFIS: DYAH FEDIAWAT/RADAR BALI

Pada Pra Audit BPK di Badung

MANGUPURA - Pemkab Badung kembali di-bayang-bayangi masalah besar dalam pengelolaan keuangan APBD tahun 2014 lalu. Pasalnya, berdasarkan informasi yang dirangkum koran ini, dalam agenda pra audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI banyak menemukan ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran di kabupaten terkaya di Bali ini. Mulai dugaan penyelewengan dana hibah oleh anggota dewan, hingga permainan anggaran perjalanan dinas (perdin) oleh SKPD ■

► *Baca Hibah... Hal 31*

Edisi : Jumat, 20 Maret 2015

Hal : 21



Dananya Sudah Keluar, Bangunannya Tak Ada

■ HIBAH...

Sambungan dari hal 21

Sumber terpercaya koran ini di lingkungan Setda Badung menyebutkan, agenda pra audit BPK RI telah usai pada 17 Maret lalu. Menurut sumber koran ini, permasalahan yang paling disoroti BPK RI adalah realisasi belanja hibah yang difasilitasi atau diarahkan oleh anggota dewan. Baik anggota dewan yang gagal dalam pemilu legislatif maupun yang lolos. "Jumlahnya ratusan juta yang tidak tepat sasaran," ujar sumber yang mewanti-wanti agar namanya dirahasiakan ini kemarin (19/3).

Pada APBD tahun 2014 lalu, Pemkab Badung membuat

pagu anggaran untuk belanja hibah ditetapkan sebesar Rp 102 miliar. Nah, dari anggaran tersebut Rp 61,6 miliar difasilitasi oleh legislatif. Anggaran ini diarahkan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan yang tidak terakomodasi dalam musrenbang maupun di APBD. Namun faktanya, imbuh sumber, BPK menemukan dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah yang diarahkan oleh anggota dewan. Sementara hibah yang diarahkan oleh dewan gagal pada pemilu legislatif ini senilai Rp 75 juta.

Dewan yang kembali berhasil duduk di kursi wakil rakyat untuk periode 2014-2019 juga diduga kuat melakukan penyimpangan

anggaran. "Ada belanja hibah yang diarahkan untuk pembangunan, tapi setelah dicek ke lapangan bangunannya tidak ada," beber sumber koran yang juga pegawai di Pemkab Badung ini.

Selain dana hibah dewan, BPK juga disebut menemukan banyak pelanggaran anggaran perjalanan dinas oleh SKPD atau instansi kedinasan. Tak kalah besar dengan dana hibah, perjalanan dinas SKPD juga banyak menyimpang. Terutama SKPD yang mempunyai agenda perjalanan dinas padat. "Semua data ini masih dipegang BPK, nanti data ini akan digunakan pendalaman saat audit yang sesungguhnya," ungkap sumber koran ini.

Kepala Inspektorat Badung Ni Luh Suryaniti mengatakan, bahwa pra audit yang dilakukan BPK RI untuk *mapping* atau pemetaan permasalahan. Menurut Suryaniti, BPK sudah selesai melaksanakan pra audit dan nantinya akan dialami saat audit yang sesungguhnya. Mengenai kabar adanya permasalahan atau temuan pada belanja hibah, mantan camat Mengwi, ini mengatakan pada pra hibah BPK memang melakukan monitoring atau pengecekan lapangan. Suryaniti sendiri mengaku belum tahu pasti kapan BPK akan mulai melaksanakan audit. "Kalau memang ada yang belum terealisasi, wajib segera direalisasikan," ujar Suryaniti. (san/yes)



Pengadaan Bibit Diduga Bermasalah

Senilai Rp 1,2 Miliar, Pemenang Dituding Tak Penuhi Syarat

NEGARA - Proyek pengadaan bibit tanaman kayu dan buah yang dilakukan Dinas Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Jembrana diduga bermasalah. Perusahaan pemenang tender pengadaan bibit dengan nilai pagu Rp 1,2 miliar tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar. Sehingga pihak yang kalah tender mengadukan ke Inspektorat Kabupaten Jembrana.

Kapala Dinas Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan (Kadis KPK) Kabupaten Jembrana I Made Maharimbawa saat dikonfirmasi membenarkan adanya pengaduan tersebut. Bahkan dirinya sudah dipanggil oleh Inspektorat untuk mengklarifikasi pengaduan atau sanggahan yang dilayangkan CV. Floradewata ke Inspektorat. "Bukan diperiksa, hanya klarifikasi saja atas pengaduan masyarakat," ungkapnya saat ditemui di Kantor Inspektorat Kabupaten Jembrana kemarin (19/3).

Arimbawa menambahkan, dirinya juga menerima tembusan yang dikirim keinspektorat oleh pihak pengadu yang notabene pihak yang kalah dalam tender pengadaan bibit tanaman jenis kayu dan buah. "Salinan pengaduan saya juga terima," jelasnya.

Dijelaskan, pengaduan yang dikirim ke Inspektorat tersebut terkait adanya lelang pengadaan

Sanggahan oleh yang kalah (lelang) bahwa perusahaan pemenang ada salah satu spek belum memenuhi syarat dan tempat beli bibit diragukan."

I Made Maharimbawa

Kadis KPK Jembrana

bibit tanaman sebanyak kurang lebih 11 jenis tanaman. Ada tanaman buah dan mangrove. Nilai pagu pengadaan bibit tersebut sebesar Rp 1,2 miliar, kemudian lelang dimenangkan oleh perusahaan CV. Wulandari dengan nilai penawaran Rp 1,1,47 miliar.

Namun setelah pemenang tender tersebut ditetapkan, perusahaan yang kalah mengadu. Alasannya perusahaan pemenang tender tidak memberikan bibit yang sesuai dengan spesifikasi. Bahkan perusahaan pemenang tender disebut tidak memenuhi syarat mengeluarkan bibit. "Sanggahan oleh yang kalah (lelang) bahwa perusahaan pemenang ada salah satu spek belum memenuhi syarat dan tempat beli bibit diragukan," terangnya. Arimbawa menegaskan kedatangannya ke Inspektorat kemarin untuk klarifikasi masalah tersebut. "Saya diminta ke Inspektorat untuk klarifikasi saja," ungkapnya. (bas/gup)